

Kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (Anbk) Sebagai Instrumen Evaluasi Mutu Pendidikan Di Indonesia

Henny Sulistiawati

Universitas Mulawarman

E-mail: hennysulis@fisip.unmul.ac.id

Article History:

Received: 11 September 2025

Revised: 24 September 2025

Accepted: 01 November 2025

Keywords: *Asesmen Nasional, Evaluasi Kebijakan, Mutu Pendidikan, Kebijakan Publik, Rapor Pendidikan*

Abstract: *Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) merupakan instrumen kebijakan strategis dalam sistem pendidikan Indonesia yang bertujuan memetakan mutu pembelajaran secara objektif, adaptif, dan berbasis data. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk transformasi evaluasi pendidikan yang lebih berorientasi pada penguatan literasi, numerasi, dan karakter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) sebagai instrumen evaluasi mutu pendidikan menggunakan perspektif teori evaluasi kebijakan Dunn dan Vedung. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap berbagai artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian empiris yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) cukup efektif dalam mengubah paradigma evaluasi pendidikan menuju pembelajaran berbasis kompetensi, efisien dalam konteks satuan pendidikan yang siap secara teknologi, serta responsif terhadap tuntutan reformasi pendidikan abad ke-21. Namun, tantangan masih muncul dalam aspek keadilan akses dan pemanfaatan hasil asesmen di tingkat sekolah. Dengan pemerataan infrastruktur dan penguatan literasi data, Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) berpotensi menjadi instrumen evaluasi kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dan inklusif.*

PENDAHULUAN

Transformasi sistem evaluasi pendidikan global dalam dua dekade terakhir menunjukkan pergeseran mendasar dari paradigma *high-stakes testing* menuju *assessment for learning* yang menekankan pentingnya literasi, numerasi, dan karakter sebagai kompetensi utama abad ke-21. Pergeseran ini muncul sebagai respons terhadap kritik terhadap model evaluasi tradisional yang cenderung berorientasi pada hasil akhir dan mengabaikan proses pembelajaran. Penelitian-penelitian internasional seperti *Programme for International Student Assessment (PISA)* dan *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)* menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pendidikan tidak hanya ditentukan oleh hasil ujian, tetapi oleh kemampuan peserta didik dalam bernalar, berpikir kritis, dan beradaptasi terhadap perubahan sosial yang kompleks (Anggoro et al., 2025). Negara-negara dengan sistem asesmen adaptif cenderung menempatkan evaluasi sebagai bagian dari proses *policy learning* yang mendorong inovasi dan refleksi kebijakan secara berkelanjutan (Tatik, Dedi Rois, Amar B.K, 2025).

Dalam konteks Indonesia, transformasi kebijakan evaluasi pendidikan merupakan bagian integral dari perubahan paradigma pendidikan nasional yang lebih luas. Selama bertahun-tahun, sistem Ujian Nasional (UN) menjadi simbol utama evaluasi pendidikan yang menilai hasil belajar peserta didik secara seragam di seluruh wilayah. Namun, model ini menuai kritik karena dianggap belum mampu mencerminkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya, mengabaikan disparitas antarwilayah, dan mendorong budaya pembelajaran yang berorientasi pada hasil akhir semata. Penelitian (Lembong et al., 2023) menunjukkan bahwa penghapusan UN melalui kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah strategis dalam mengubah paradigma tersebut dengan menekankan pentingnya otonomi, inovasi, dan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi.

Sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar, pemerintah memperkenalkan Asesmen Nasional (AN) yang terdiri dari tiga komponen utama: *Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)*, *Survei Karakter*, dan *Survei Lingkungan Belajar*. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan potret menyeluruh tentang mutu pendidikan nasional dengan menilai kemampuan dasar literasi membaca, numerasi, serta karakter profil pelajar Pancasila. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) tidak berfungsi sebagai alat seleksi atau penentu kelulusan, melainkan sebagai instrumen diagnostik yang menghasilkan data untuk perbaikan pembelajaran dan pengambilan kebijakan berbasis bukti (Siti Solekha, Purwati, 2024).

Hasil dari asesmen diintegrasikan ke dalam Rapor Pendidikan, yang berfungsi sebagai media refleksi dan perencanaan berbasis data di tingkat satuan pendidikan. Melalui platform ini, sekolah dapat menjalankan siklus *Identifikasi–Refleksi–Benahi (IRB)* untuk menemukan akar masalah dan menyusun strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran. Seperti diungkapkan oleh (Darlian et al., 2025), Rapor Pendidikan menjadi inovasi kebijakan penting yang menghubungkan data asesmen dengan praktik perencanaan sekolah, sekaligus memperkuat budaya reflektif di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) berfungsi tidak hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai *policy instrument* dalam kebijakan Merdeka Belajar yang menggerakkan proses *policy feedback* di seluruh jenjang pendidikan.

Namun demikian, meskipun Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) telah diterapkan secara nasional sejak 2021, kajian akademik yang menilai efektivitas kebijakan ini secara komprehensif masih terbatas. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada kesiapan infrastruktur, kesiapan teknis, dan tantangan implementasi, sementara dimensi evaluatif seperti efektivitas, efisiensi, keadilan, responsivitas, dan akurasi data belum banyak dikaji secara mendalam (Darlian et al., 2025; Siti Solekha, Purwati, 2024). Padahal, pemahaman yang mendalam terhadap dimensi-dimensi tersebut penting untuk memastikan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) benar-benar berfungsi sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan berbasis data. Selain itu, belum banyak kajian yang menilai Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) melalui perspektif evaluasi kebijakan publik, padahal pendekatan tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana kebijakan ini bekerja sebagai sistem pembelajaran kebijakan (*policy learning system*).

Kerangka teoretis William N. Dunn (2018) dan Vedung (1997) memberikan landasan konseptual yang relevan untuk menilai kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) secara komprehensif. Menurut Dunn, evaluasi kebijakan mencakup enam dimensi penting—*efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan*—yang memungkinkan analisis menyeluruh terhadap kinerja kebijakan publik. Sementara itu, Vedung menekankan evaluasi sebagai sarana *policy feedback* dan *policy learning* untuk perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Dalam konteks Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), kedua teori ini memungkinkan analisis yang tidak hanya mengukur hasil implementasi, tetapi juga menilai kapasitas kebijakan dalam menciptakan mekanisme pembelajaran adaptif dan reflektif di satuan

.....

pendidikan (Lembong et al., 2023; Siti Solekha, Purwati, 2024).

Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) sebagai instrumen evaluasi mutu pendidikan nasional dengan menggunakan perspektif teori evaluasi kebijakan publik. Analisis difokuskan pada bagaimana Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) mampu mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan, menciptakan keadilan akses terhadap asesmen berbasis teknologi, meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan satuan pendidikan, serta menjamin akurasi data yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi tantangan dan peluang pemanfaatan hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di tingkat sekolah dan daerah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan bagi Kemendikbudristek, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan agar Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dapat berfungsi optimal sebagai bagian dari siklus pembelajaran kebijakan nasional. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia melalui pendekatan berbasis teori Dunn dan Vedung yang menempatkan evaluasi bukan sekadar alat kontrol, tetapi sebagai mekanisme pembelajaran kebijakan yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Data penelitian mencakup artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta 2–4, prosiding, laporan resmi Kemendikbudristek, dan dokumen kebijakan pendidikan. Literatur yang dianalisis dipilih berdasarkan tiga kriteria: (1) relevansi dengan kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), (2) periode publikasi 2020–2025, dan (3) kredibilitas akademik. Analisis data dilakukan dengan reduksi, klasifikasi tematik sesuai teori evaluasi kebijakan Dunn dan Vedung, dan sintesis analitik untuk menghasilkan pemahaman holistik. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan validasi teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kepustakaan mengenai kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) menunjukkan bahwa kebijakan ini berperan sebagai instrumen penting dalam sistem evaluasi mutu pendidikan di Indonesia. Dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan Dunn (2018) dan Vedung (1997), Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dapat dipahami sebagai kebijakan publik yang berorientasi pada *policy feedback* dan *policy learning* yang berfungsi menilai efektivitas sistem pendidikan serta menjadi dasar perumusan kebijakan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Efektivitas & Efisiensi Pelaksanaan ANBK

Hasil kajian menunjukkan bahwa ANBK efektif dalam mengubah paradigma evaluasi pendidikan yang sebelumnya terlalu berorientasi pada hasil akhir. Transformasi ini terlihat dari pergeseran paradigma evaluasi menuju *outcome-based assessment* yang mengukur literasi, numerasi, dan karakter peserta didik secara komprehensif. Implementasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) juga mendorong perubahan perilaku organisasi di satuan pendidikan. Sekolah mulai mengintegrasikan hasil asesmen ke dalam perencanaan strategis, termasuk melalui

.....

Rapor Pendidikan, yang menjadi instrumen refleksi dan pengambilan keputusan berbasis data.

Meskipun secara konseptual efektif, tantangan masih muncul dalam tahap pemanfaatan hasil asesmen. Beberapa sekolah belum sepenuhnya menggunakan hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) untuk perbaikan mutu pembelajaran karena keterbatasan literasi data dan kemampuan analisis di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, efektivitas Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) akan semakin kuat apabila disertai pelatihan dan pendampingan teknis bagi kepala sekolah serta guru dalam menginterpretasikan dan menindaklanjuti data asesmen.

Dari sisi efisiensi, Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) memberikan kemajuan besar dengan mengurangi beban administrasi, logistik, dan biaya pencetakan ujian. Digitalisasi melalui sistem berbasis komputer meningkatkan kecepatan pengolahan data dan meminimalkan kesalahan manual. Namun, efisiensi ini belum merata di seluruh wilayah. Sekolah yang telah memiliki kesiapan infrastruktur menunjukkan efisiensi tinggi, sementara daerah dengan keterbatasan sarana harus menanggung beban tambahan berupa kebutuhan perangkat, jaringan internet, dan tenaga teknis.

Mengacu pada kerangka Vedung, efisiensi kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) masih bersifat asimetri spasial: hasil optimal terjadi di wilayah dengan dukungan infrastruktur kuat, sedangkan wilayah 3T memerlukan intervensi afirmatif agar kesenjangan efisiensi dapat ditekan.

Keadilan (Equity)

Dimensi keadilan dalam kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) menyoroti persoalan kesenjangan digital yang masih terjadi antarwilayah di Indonesia. Walaupun ANBK dirancang untuk memberikan kesempatan setara bagi semua satuan pendidikan, dalam praktiknya kesenjangan infrastruktur TIK menjadi faktor pembeda yang signifikan. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan umumnya lebih siap melaksanakan asesmen berbasis komputer karena memiliki fasilitas perangkat, jaringan internet stabil, dan tenaga teknis yang memadai. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan dan 3T sering menghadapi kendala listrik, keterbatasan komputer, serta akses jaringan yang tidak konsisten, sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan asesmen.

Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas hasil asesmen tidak semata mencerminkan kemampuan belajar peserta didik, tetapi juga bergantung pada kondisi lingkungan belajar. Kajian literatur menunjukkan bahwa keterbatasan sarana digital menyebabkan sekolah di daerah tertinggal cenderung mengalami kesulitan teknis dalam pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), bahkan beberapa terpaksa melaksanakan asesmen secara bergantian karena kekurangan perangkat. Akibatnya, hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) berpotensi bias terhadap kondisi geografis dan ekonomi sekolah, bukan murni terhadap capaian pembelajaran peserta didik.

Dalam kerangka teori evaluasi kebijakan, keadilan (equity) menuntut agar kebijakan publik memberikan manfaat yang setara bagi semua kelompok sasaran, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan struktural. Prinsip ini menghendaki bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya fokus pada efektivitas capaian, tetapi juga pemerataan kesempatan untuk mencapai hasil yang sama. Dalam konteks Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), pemerataan manfaat ini perlu diwujudkan melalui kebijakan afirmatif yang menjamin keberlanjutan dukungan TIK bagi sekolah dengan keterbatasan sumber daya.

Beberapa artikel menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam memperluas infrastruktur digital, seperti program *Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi* dan *Digitalisasi Sekolah Dasar*, sudah membantu sebagian sekolah di daerah terpencil, namun belum merata secara nasional

(Hadiyat, 2014; Sari Madani Rambe, Risnawati, 2025; Wuwur, 2023). Oleh karena itu, Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) perlu diintegrasikan dengan kebijakan pemerataan akses pendidikan digital melalui sinergi lintas lembaga antara Kemendikbudristek, Kominfo, dan pemerintah daerah.

Selain itu, dimensi keadilan juga berkaitan dengan keadilan prosedural dan substantif. Keadilan prosedural menekankan kesetaraan dalam pelaksanaan asesmen pada setiap sekolah memperoleh kondisi teknis yang setara untuk berpartisipasi. Sedangkan keadilan substantif menekankan kesetaraan hasil, yaitu bagaimana kebijakan membantu sekolah dengan kondisi lemah agar mampu mencapai hasil yang sepadan (Vedung, n.d.). Dalam konteks Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), hal ini berarti pemberian dukungan tambahan berupa pelatihan proktor, bantuan perangkat TIK, serta kebijakan pelaksanaan fleksibel di daerah 3T agar hasil asesmen benar-benar merefleksikan capaian belajar peserta didik, bukan disparitas fasilitas.

Dengan demikian, keadilan dalam Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) tidak hanya bermakna pemerataan kesempatan, tetapi juga kesetaraan dalam memperoleh manfaat kebijakan. Pendekatan *equity-based policy* ini sejalan dengan prinsip *policy fairness* yang menuntut agar kebijakan publik secara aktif menutup kesenjangan struktural di antara penerimanya (Dunn, 2017). Implementasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang berkeadilan memerlukan dukungan kebijakan digitalisasi pendidikan yang berkelanjutan, pendampingan teknis di sekolah tertinggal, serta sistem pemantauan berbasis wilayah untuk menjamin inklusivitas dan keberlanjutan kebijakan evaluasi mutu pendidikan nasional.

Responsivitas

Kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) menunjukkan tingkat responsivitas tinggi terhadap perubahan paradigma pendidikan global yang menekankan literasi, numerasi, dan karakter sebagai kompetensi utama abad ke-21. Pemerintah merespons kebutuhan ini dengan membangun sistem asesmen berbasis data dan refleksi kebijakan, yang mendorong sekolah untuk tidak hanya melaksanakan asesmen, tetapi juga menggunakan hasilnya sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan mutu. Pemanfaatan hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) diwujudkan melalui platform Rapor Pendidikan, yang menyediakan data diagnostik bagi sekolah untuk mengidentifikasi akar masalah dan menyusun strategi perbaikan melalui siklus *Identifikasi–Refleksi–Benahi (IRB)*. Proses ini memperlihatkan upaya pemerintah membangun sistem *policy feedback* yang mendorong pembelajaran kebijakan (*policy learning*) di tingkat satuan pendidikan.

Sejumlah sekolah telah menunjukkan kemampuan adaptif dengan mengintegrasikan hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dalam perencanaan berbasis data (Diani Ayu Pratiwi, Sulistiyana, 2025; Handayani et al., 2025). Hasil asesmen digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), mengembangkan program peningkatan kompetensi guru, serta memperkuat budaya reflektif di lingkungan sekolah. Namun demikian, tingkat responsivitas antarwilayah masih beragam. Banyak sekolah belum memanfaatkan hasil asesmen secara optimal karena keterbatasan literasi data, minimnya pelatihan analisis, dan belum adanya mekanisme pengawasan tindak lanjut hasil asesmen.

Dalam konteks ini, mekanisme *feedback loop* belum berjalan sepenuhnya. Data Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) sering berhenti di tahap pelaporan administratif tanpa diikuti tindakan korektif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan pengawas dalam menganalisis serta menindaklanjuti data menjadi krusial. Integrasi teknologi informasi juga menjadi faktor kunci yang dapat memperkuat responsivitas kebijakan. Pemanfaatan platform digital dalam analisis data dan refleksi mutu memungkinkan sekolah mengambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis bukti.

Responsivitas kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dengan demikian tidak hanya diukur dari kecepatan pemerintah menyesuaikan regulasi, tetapi juga dari kemampuan aktor pendidikan di lapangan dalam menafsirkan, mengolah, dan menggunakan data asesmen untuk perbaikan mutu. Ketika hasil asesmen menjadi bagian integral dari siklus *planning–doing–reviewing* di sekolah, ANBK berfungsi optimal sebagai instrumen pembelajaran kebijakan yang adaptif dan partisipatif.

Akurasi Data

Akurasi data merupakan dimensi krusial dalam menilai efektivitas kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) sebagai instrumen evaluasi mutu pendidikan. Dalam konteks kebijakan publik, akurasi data menentukan sejauh mana informasi yang dihasilkan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (*evidence-based policymaking*).

Sistem Computerized Adaptive Test (CAT) yang diterapkan dalam ANBK menjadi inovasi penting yang meningkatkan validitas hasil asesmen. Dengan menyesuaikan tingkat kesulitan soal terhadap kemampuan peserta didik, sistem ini menghasilkan gambaran kemampuan literasi dan numerasi yang lebih proporsional dan individual. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa keandalan data Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) masih sering terpengaruh oleh faktor teknis seperti kestabilan jaringan internet, keterbatasan perangkat komputer, serta perbedaan keterampilan teknis antara proktor dan administrator ujian (Ahmad, 2022; Utami, Karinta, Ema, Cicin, Nuryanti, Risbon, 2022). Gangguan jaringan dan kesalahan input data menjadi kendala yang berimplikasi langsung terhadap reliabilitas hasil asesmen.

Kualitas pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) juga ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur digital. Kajian terbaru mengungkapkan bahwa banyak sekolah masih berada pada tahap awal transformasi digital; sebagian besar guru dan teknisi belum memiliki kemampuan yang optimal dalam pengelolaan sistem asesmen berbasis komputer. Pelatihan berbasis model pengembangan instruksional, seperti *ADDIE*, terbukti mampu meningkatkan kompetensi digital tenaga pendidik dan peserta didik secara signifikan, terutama dalam penguasaan sistem asesmen dan pengolahan data hasil tes. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM merupakan faktor strategis dalam menjaga reliabilitas dan akurasi data asesmen nasional.

Selain faktor teknis dan kompetensi, akurasi data Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) memiliki hubungan langsung dengan kebijakan turunan seperti Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD). Data asesmen yang valid menjadi dasar utama bagi sekolah dalam mengidentifikasi masalah pembelajaran serta menetapkan prioritas program peningkatan mutu. Studi menunjukkan bahwa sekolah yang secara aktif memanfaatkan data Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dalam proses perencanaan dan evaluasi program mengalami peningkatan signifikan dalam efektivitas pembelajaran, pengelolaan sekolah, serta pengambilan keputusan berbasis data (Herfiyanti et al., 2024; Sadat, n.d.).

Meski demikian, disparitas infrastruktur masih menimbulkan variasi dalam kualitas data antarwilayah. Sekolah di wilayah dengan dukungan teknologi memadai mampu menghasilkan data yang konsisten dan valid, sedangkan sekolah di daerah 3T sering menghadapi gangguan teknis yang mengurangi keandalan data asesmen. Perbedaan ini berpotensi menciptakan bias dalam agregasi data nasional, yang pada gilirannya dapat memengaruhi objektivitas evaluasi kebijakan pendidikan secara keseluruhan.

Dalam perspektif teori evaluasi kebijakan Dunn (2018) dan Vedung (1997), akurasi data merupakan unsur dari efektivitas substantif kebijakan menunjukkan sejauh mana hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan dapat dijadikan dasar perbaikan kebijakan publik. Oleh karena itu, peningkatan akurasi data Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)

harus disertai dengan sistem validasi berlapis, audit teknis berkala, serta pendampingan bagi sekolah yang menghadapi kendala infrastruktur.

Secara keseluruhan, penguatan akurasi data Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) tidak dapat dilepaskan dari tiga aspek utama: peningkatan literasi digital tenaga pendidik, pemerataan infrastruktur teknologi informasi, dan sistem pengawasan berstandar nasional. Jika ketiganya berjalan serempak, Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) berpotensi menjadi instrumen kebijakan yang kredibel dan akuntabel dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti serta pembangunan mutu pendidikan nasional yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur dan hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) merupakan bentuk inovasi kebijakan evaluasi pendidikan yang membawa perubahan penting dalam sistem penilaian mutu pendidikan di Indonesia. Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kemampuan akademik, tetapi juga sebagai instrumen refleksi kebijakan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran.

Melalui perspektif Teori Evaluasi Kebijakan Dunn dan Vedung, pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dapat dikategorikan efektif secara substantif, karena mampu menyediakan data yang relevan bagi perbaikan mutu pendidikan. Namun, efektivitas tersebut masih perlu diperkuat melalui optimalisasi pemanfaatan hasil asesmen di tingkat satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Dari sisi efisiensi, pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) memberikan manfaat dalam penghematan sumber daya dan percepatan proses evaluasi, tetapi efisiensi ini belum sepenuhnya merata akibat kesenjangan infrastruktur dan kemampuan teknologi di berbagai wilayah.

Dalam hal keadilan, Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) masih menghadapi tantangan pemerataan akses dan kesiapan teknologi antar daerah. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan afirmatif untuk menjamin hak yang sama bagi seluruh peserta didik dalam mengikuti asesmen nasional. Sementara itu, responsivitas kebijakan menunjukkan adanya upaya adaptif dari pemerintah dan sekolah dalam menggunakan hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) sebagai dasar perencanaan pendidikan, meskipun masih diperlukan penguatan sistem umpan balik dan tindak lanjut berbasis data. Dari dimensi akurasi data, sistem asesmen berbasis komputer telah meningkatkan validitas hasil penilaian, tetapi reliabilitas pelaksanaan masih bergantung pada kesiapan teknis dan kompetensi operator di lapangan.

Secara umum, kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dapat dinilai sebagai instrumen evaluasi kebijakan pendidikan yang strategis, adaptif, dan berorientasi pada perbaikan mutu pendidikan nasional, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pemerataan, responsivitas kebijakan, dan pemanfaatan hasil asesmen.

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk memperkuat kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) adalah sebagai berikut.

1. Pemerataan infrastruktur digital pendidikan.
Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan sekolah di wilayah 3T memiliki sarana TIK yang memadai agar pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) bisa berjalan merata dan adil di seluruh Indonesia.
 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Guru, kepala sekolah, dan proktor perlu mendapat pelatihan rutin tentang penggunaan hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), literasi data, dan pengelolaan asesmen
-

berbasis teknologi supaya proses evaluasi lebih efektif dan tepat sasaran.

3. Pemanfaatan hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) secara optimal. Data Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) sebaiknya tidak hanya menjadi laporan, tetapi juga dijadikan dasar perencanaan dan evaluasi mutu di sekolah maupun pemerintah daerah.
4. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Perlu ada sistem pemantauan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang melibatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian agar pelaksanaannya lebih transparan dan hasilnya dapat diukur dengan jelas.
5. Penguatan kebijakan berbasis data. Pemerintah perlu menggunakan data Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) sebagai dasar dalam membuat kebijakan pendidikan supaya keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Dengan dukungan pemerataan akses, peningkatan kapasitas pelaksana, dan pemanfaatan data yang lebih baik, Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dapat menjadi alat penting untuk menilai sekaligus memperbaiki mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan dan inklusif.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad. (2022). *Pemantauan Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Sekolah Dasar Binaan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021* Ahmad. 9(1), 34–44.
- Anggoro, B. S., Zahra, N. F., Muhammad, R. R., Wahyu, R., & Putra, Y. (2025). *PERBANDINGAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA URBAN DAN RURAL : ANALISIS DATA AKM NASIONAL 2021*. 3.
- Darlian, L., Sabilu, M., Kolaka, L., Biologi, P., & Technology, A. (2025). *Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan Mutu Pendidikan Berkelanjutan melalui Pembelajaran Berbasis*. 6(2), 255–264.
- Diani Ayu Pratiwi, Sulistiyana, A. S. (2025). *DATA TAK BERSAMBUT: PERSEPSI KEPALA SEKOLAH DASAR ATAS SINERGI KEBIJAKAN RAPOR PENDIDIKAN*. 10.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge. https://books.google.co.id/books?id=v_uaQAACAAJ
- Hadiyat, Y. D. (2014). *Kesenjangan Digital di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi) Digital Divide in Indonesia*. 17(2), 81–90.
- Handayani, R., Apriani, B. K., & Mustari, M. (2025). *Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam Perencanaan Berbasis Data untuk Meningkatkan Mutu Sekolah di SDN 44 Ampenan*. 10, 336–342.
- Herfiyanti, N., Setiyanti, W., & Wulandari, A. (2024). *PENINGKATAN MUTU SEKOLAH DENGAN PERENCANAAN BERBASIS DATA RAPOR PENDIDIKAN*. 4(3), 508–512.
- Lembong, J. M., Lumapow, H. R., Nicodemus, V., & Rotty, J. (2023). *Implementasi Merdeka Belajar Sebagai Transformasi Kebijakan Pendidikan*. 9(2), 765–777. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4620>
- Sadat, A. (n.d.). *Asesmen nasional dan rapor pendidikan serta pemanfaatannya untuk perencanaan berbasis*. 73–82.
- Sari Madani Rambe, Risnawati, S. Y. (2025). *DIGITAL DIVIDE DALAM PENERAPAN PENDEKATAN DEEP*. 11(2), 942–952.
- Siti Solekha, Purwati, N. (2024). *Magister Manajemen Pendidikan , Universitas PGRI Semarang , Jawa Tengah , Indonesia*. 5(2), 972–979.

- Tatik, Dedi Rois, Amar B.K, F. (2025). *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keguruan Islam KEMAMPUAN AKADEMIK : ANALISIS KEBIJAKAN DALAM*. 1(2), 116–123.
- Utami, Karinta, Ema,Cicin, Nuryanti, Risbon, L. N. (2022). *Manajemen Pembiayaan ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer) di Sekolah Dasar Kota Tasikmalaya*. 5(2), 502–509.
- Vedung, E. (n.d.). *Public Policy and Program Evaluation*. Transaction Publishers. <https://books.google.co.id/books?id=16Bm71BfI6YC>
- Wuwur, E. S. P. O. (2023). *Analisis Kesiapan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di Sekolah Dasar Daerah 3T*. 1(1).
-